

Original Research Paper

Uji Sertifikasi Manajer Lapangan Pelaksanaan Bangunan Gedung Bagi Calon Wisudawan Prodi Jenjang D4 Sebagai Surat Keterangan Pendamping Ijazah

Hanie Teki Tjendani^{*1}, Risma Marleno², Esti Wulandari³, Laksono Djoko Nugroho⁴, Shinta Berlinda Wulandari⁵, Aviska Triyaska⁶

^{1,2,3,4,5,6}Fakultas Teknik, Prodi Magister Teknik Sipil, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Surabaya, Indonesia.

DOI: <https://doi.org/10.29303/jpmipi.v7i4.9964>.

Sitasi: Tjendani, T. H., Marleno, R., Wulandari, E., Nugroho, D. L., Wulandari, B. S., & Triyaska, A. (2024) Uji Sertifikasi Manajer Lapangan Pelaksanaan Bangunan Gedung Bagi Calon Wisudawan Prodi Jenjang D4 Sebagai Surat Keterangan Pendamping Ijazah. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, (4)

Article history

Received: 04 Oktober 2024

Revised: 20 November 2024

Accepted: 04 Desember 2024

*Corresponding Author:

Hanie Teki Tjendani,
Prodi Magister Teknik Sipil,
Universitas 17 Agustus 1945
Surabaya, Surabaya, Indonesia.
Email: hanie@untag-sby.ac.id

Abstract: Every construction worker engaged in the construction services field must have a Work Competency Certificate (Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi/SKK Konstruksi). Every owner and service provider must employ construction workers with an SKK Konstruksi. Construction Service work contracts must include the use of certified construction workers. The SKK-K is a mandatory requirement for working in the construction services sector. This paper will discuss the competency assessment activities conducted by recent D4 graduates to obtain a work competency certificate for the job position of Building Execution Field Manager Level 6. This serves as a graduation requirement and as a Supplementary Diploma Certificate (SKPI; surat keterangan pendamping ijazah). In this assessment, all assessors passed and were declared competent. The students' capabilities are supported by fieldwork practice activities, which are included in the curriculum of their respective study programs. The students have passed the competency assessment, meaning that upon graduation, they already hold both a diploma and a Work Competency Certificate.

Keywords: Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi (SKK Konstruksi), Work Competention Component; Work Competency Certificate

Pendahuluan

Uji kompetensi adalah proses penilaian yang bertujuan untuk mengukur kemampuan seseorang berdasarkan standar kompetensi tertentu dalam bidang tertentu. Uji ini biasanya dilakukan untuk memastikan bahwa seseorang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk menjalankan tugas-tugas tertentu secara profesional. Uji kompetensi wajib dilakukan oleh individu yang ingin memastikan atau membuktikan kelayakan kompetensi mereka dalam bidang tertentu, terutama dalam konteks profesional. Beberapa kelompok yang diwajibkan atau dianjurkan mengikuti uji kompetensi antara lain tenaga kerja professional untuk mendapatkan

sertifikasi yang diakui, baik nasional maupun internasional, sebagai bukti kompetensi di bidang tertentu, sebagai contoh profesi yang berhubungan dengan keinsinyuran, tenaga kesehatan (dokter, perawat, apoteker), pengajar, dosen, atau pelatih (sertifikasi pendidik).

Uji kompetensi juga dilakukan kepada lulusan pendidikan atau pelatihan vokasi lulusan SMK atau politeknik, peserta pelatihan kerja atau magang. Profesi yang diatur oleh Undang-Undang atau Regulasi juga diwajibkan mengikuti uji kompetensi dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan hukum dalam menjalankan pekerjaan tertentu, sebagai contoh tenaga konstruksi wajib memiliki sertifikasi kompetensi berdasarkan UU Jasa Konstruksi di Indonesia, pilot, pelaut, atau

tenaga kerja di sektor energi dan pertambangan juga diwajibkan mengikuti uji kompetensi (Huliyah et al., 2023).

Individu yang mengikuti Sertifikasi Profesi bertujuan meningkatkan daya saing dan kepercayaan pasar kerja terhadap kompetensi mereka. Profesional yang ingin meningkatkan karier atau berpindah bidang pekerjaan harus mengikuti uji kompetensi sesuai dengan bidang yang akan ditekuni (Rahman et al., 2023).

Pada suatu lembaga atau organisasi mewajibkan sertifikasi dengan tujuan menjamin kualitas tenaga kerja sesuai standar organisasi, diantaranya perusahaan yang mensyaratkan sertifikasi tertentu untuk posisi tertentu, lembaga pendidikan yang mewajibkan sertifikasi bagi pengajarnya. Uji kompetensi difasilitasi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan sertifikat dikeluarkan oleh yang diakui pemerintah, seperti BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) di Indonesia.

Kewajiban tenaga kerja konstruksi berdasarkan UU No.2 tahun 2017 Pasal 70 adalah Setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang Jasa konstruksi wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK). Setiap Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa wajib mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja. Kontrak kerja jasa konstruksi harus mencakup penggunaan tenaga kerja konstruksi bersertifikat. SKK-K menjadi syarat bekerja di bidang Jasa Konstruksi (Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, 2017).

Klasifikasi tenaga bidang konstruksi berdasarkan bidang keilmuan yang terkait dengan jasa konstruksi terdapat 8 klasifikasi yaitu: arsitektur, sipil, mekanikal, tata lingkungan, arsitektur lanskap iluminasi dan desain interior (ILIDI), perencanaan wilayah dan kota, sains dan rekayasa teknik dan yang terakhir manajemen pelaksanaan. Untuk sub klasifikasi sebagai berikut: Klasifikasi Arsitektur memiliki sub klasifikasi Arsitektur; klasifikasi Sipil dengan sub klasifikasi antara lain Gedung, Jalan, Jembatan, Landasan Udara, Jalan Rel, Bangunan Pelabuhan, Bangunan Air Minum dan masih banyak lagi. Untuk sub klasifikasi Mekanikal terdiri dari sub klasifikasi Teknik Tata Udara dan Refrigerasi, Plumbing dan Pompa Mekanik, Proteksi Kebakaran dan lain sebagainya. Sub Klasifikasi Teknik Air Minum, Teknik Lingkungan, Teknik Perpipaan dan

lain-lain masuk dalam Klasifikasi Tata Lingkungan. Pada Klasifikasi Manajemen Pelaksanaan ada sub klasifikasi Keselamatan Konstruksi, Manajemen Konstruksi/ Manajemen Proyek, Hukum Kontrak Konstruksi, Manajemen Aset Hasil Konstruksi dan lain sebagainya. Untuk Klasifikasi Arsitektur Lanskap, Iluminasi dan Disain Interior terdapat sub klasifikasi Arsitektur Lanskap, Teknik Iluminasi dan Disain Interior. Sub klasifikasi Perencanaan Wilayah, Perencanaan Kota (Urban Planning/Urban Design) termasuk dalam Klasifikasi Perencanaan Wilayah dan Kota. Untuk klasifikasi Sain dan Rekayasa Teknik terdapat sub klasifikasi investasi infrastruktur, komputasi konstruksi dan peledakan (Winarni & Kuncorowati, 2020).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi serta peraturan pelaksanaannya, tenaga kerja yang bertugas dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan konstruksi diwajibkan memiliki sertifikat keahlian atau keterampilan. Kewajiban ini menunjukkan adanya kebutuhan akan tenaga kerja yang berkualitas dan kompeten. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret untuk mempersiapkan perangkat berupa standar baku yang dapat digunakan untuk menilai kualitas kerja di bidang jasa konstruksi (Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No 192 Tahun 2016, 2016).

Untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh tenaga personel badan usaha jasa konstruksi yang kurang kompeten, penting untuk memahami kebutuhan personel sebelum mengajukan penawaran pada suatu paket pekerjaan. Hal ini mencakup memastikan bahwa sumber daya yang tersedia memiliki keahlian yang andal sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang diperlukan (Gunawan & Hakim, 2023). Pada suatu proyek, untuk memenuhi kebutuhan produk yang sesuai dengan standar kualitas memerlukan dukungan dari sumber daya manusia, standar mutu, metode kerja, dan elemen terkait lainnya. Salah satu cara untuk menghasilkan produk konstruksi dengan kualitas yang diharapkan adalah melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terlibat dalam berbagai pekerjaan konstruksi, termasuk desain jalan dan jembatan, desain hidromekanik untuk pekerjaan sumber daya air, serta desain pada proyek bangunan gedung (Ony Sulaksono, 2007).

Risiko pada pelaksanaan proyek konstruksi adalah rendahnya tingkat produktivitas tenaga kerja. Respon risiko yang dilakukan adalah dengan

merekrut tenaga kerja baru yang memiliki skill dan keterampilan yang baik dan penempatan pekerja sesuai dengan keterampilannya masing-masing, pengadaan jam lembur, melakukan evaluasi terhadap produktivitas tenaga kerja setiap hari, memberikan insentif kepada pekerja yang memiliki produktivitas rata-rata dan punishment kepada pekerja yang memiliki produktivitas rendah (Fitria, 2017).

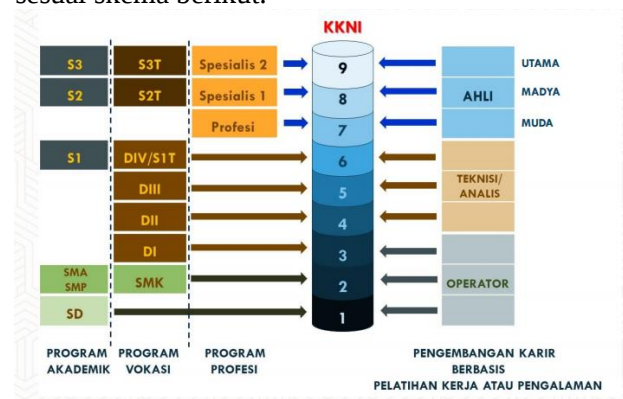
Seorang tenaga ahli yang telah memiliki SKK artinya telah memiliki *knowledge*, *skill* dan *attitude* serta *passion* sesuai dengan bidang yang ditekuni, karena untuk dapat memperoleh SKK bukan hal yang mudah dan memerlukan suatu proses. Permohonan SKK Konstruksi disampaikan kepada LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) di bidang konstruksi yang terlisensi dan tercatat di Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK). Jenis permohonan SKK Konstruksi meliputi: permohonan baru, permohonan perpanjangan dan permohonan perubahan data. Semua permohonan tersebut dilakukan melalui portal perizinan <https://perizinan.pu.go.id/portal/>. Penyelenggaraan uji kompetensi dilakukan oleh LSP P3. Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) adalah sebuah institusi resmi yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sertifikasi kompetensi kerja bagi tenaga kerja di berbagai bidang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. LSP berfungsi untuk memastikan bahwa individu yang bekerja dalam suatu bidang atau profesi memiliki kompetensi, keahlian, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional maupun internasional yang berlaku (Widiasanti et al., 2021). Ketentuan kepemilikan SKK telah diatur mulai dari tenaga operator, teknisi/analisis dan tenaga ahli agar tercapai efektifitas dalam melaksanakan jabatan kerja untuk masing-masing individu.



Gambar 1. Ketentuan kepemilikan SKK Konstruksi

Makalah ini akan membahas kegiatan Uji Kompetensi yang dilakukan mahasiswa yang baru

lulus jenjang D4 dengan tujuan untuk mendapatkan Sertifikat Kompetensi Kerja untuk jabatan kerja Manajer Lapangan Pelaksanaan Bangunan Gedung Jenjang 6, sebagai syarat kelulusan dan sebagai Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI). Kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. Penyetaraan capaian pembelajaran yang dihasilkan sesuai skema berikut.



Gambar 2. Penyetaraan Capaian Pembelajaran

Kegiatan uji kompetensi ini dilaksanakan di Kampus ITS Manyar Jln Raya Menur No. 127 Surabaya. Kegiatan ini merupakan program pemerintah yang dilaksanakan oleh Balai Jasa Konstruksi Wilayah 4 Surabaya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2024.



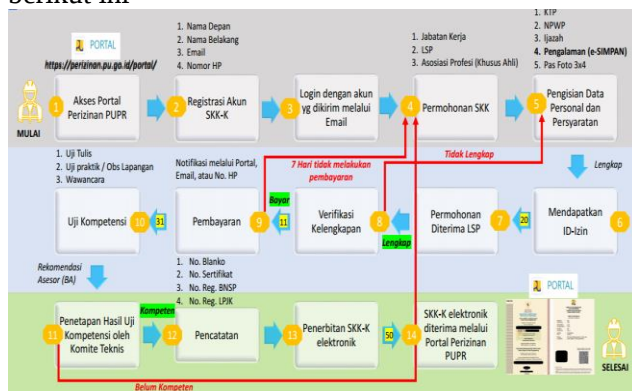
Gambar 3. Kegiatan BJKW Wilayah 4 Surabaya TA 2024

Metode Pelaksanaan

Penyusunan makalah ini berdasarkan pada praktek langsung yang dilakukan oleh asesi dan asesor pada jabatan kerja Manajer Lapangan

Pelaksanaan Bangunan Gedung jenjang 6. Kegiatan Uji Kompetensi ini diberikan kepada para mahasiswa yang telah menyelesaikan studi D4 atau sederajat dan juga mahasiswa yang sudah lulus semua mata kuliah dalam jumlah tertentu atau sudah menyelesaikan tugas akhir.

Adapun kegiatan yang dilakukan pertama oleh asesi (pihak yang mengikuti Uji Kompetensi) adalah melakukan registrasi atau pendaftaran peserta dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan seperti copy ijazah atau kartu hasil studi (KHS) yang menunjukkan jumlah satuan kredit semester (SKS) kelulusan. Bila syarat-syarat telah terpenuhi maka akan ditentukan waktu untuk melakukan Uji Kompetensi, sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut ini



Gambar 4. Alur Permohonan SKK Konstruksi untuk asesi baru

Hasil dan Pembahasan

Pada pelaksanaan uji kompetensi, para asesor telah memiliki daftar nama asesi yang akan di uji. Asesor harus memastikan bahwa asesi yang mengikuti uji kompetensi benar-benar asesi sesuai dengan identitas pada saat melakukan pendaftaran. Pada uji kompetensi jabatan kerja Manajer Lapangan Pelaksanaan Bangunan Gedung jenjang 6 ini dilakukan dengan presentasi sesuai jabatan kerja oleh asesi dan dilakukan masing-masing asesi selama 15 menit sudah termasuk tanya jawab asesi dengan asesor untuk menggali kemampuan asesi. Sebelum melakukan presentasi, asesor meminta asesi menunjukkan kartu identitas yang masih berlaku, sehingga kegiatan ini memenuhi prinsip-prinsip asesmen yaitu *valid* artinya seluruh aktivitas asesmen mengacu kepada acuan (*benchmark*) yang valid.



Gambar 5. Asesi sesuai Kartu Identitas

Perangkat uji kompetensi disusun berdasarkan SKKNI dan SOP bangunan gedung sesuai kompetensi untuk jenjang 6 Manajer Lapangan Pelaksanaan Bangunan Gedung. Untuk jabatan kerja ini diikuti oleh 19 orang mahasiswa sedangkan untuk jabatan kerja lainnya juga tersedia sehingga total peserta uji kompetensi ada 112 orang dengan beberapa asesor sesuai masing-masing jabatan kerja.

Pada uji kompetensi ini semua peserta dinyatakan kompeten. Para peserta secara umum telah mengikuti praktek kerja lapangan (PKL) sesuai kurikulum pada program studi yang dilakukan selama 4 bulan di proyek-proyek *high rise building* dan beberapa bangunan bertingkat minimal 6 lantai sehingga pengetahuan yang didapat selama mengikuti PKL telah mampu menjawab permasalahan dan studi kasus yang diajukan oleh para asesor.

Kesimpulan

Kegiatan uji kompetensi yang diikuti para mahasiswa tingkat akhir ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Seluruh asesi lulus dan dinyatakan kompeten.
2. Kemampuan mahasiswa didukung dengan kegiatan Praktek Kerja Lapangan yang sudah masuk dalam kurikulum yang berlaku di program studi masing-masing.
3. Mahasiswa telah lulus uji kompetensi dan kompeten artinya setelah lulus mahasiswa telah memiliki ijazah dan sertifikat kompetensi kerja.

Saran

Berdasarkan kegiatan uji kompetensi yang telah dilakukan ada beberapa hal yang dapat disampaikan yaitu:

1. Menambahkan jabatan kerja sesuai dengan minat mahasiswa, pada saat pelaksanaan terdapat mahasiswa mengambil jabatan kerja yang tidak sesuai karena jabatan kerja yang diujikan kurang variatif.
2. Balai Jasa Konstruksi Wilayah 4 Surabaya diharapkan menambah kerjasama dengan beberapa LSP P3 agar dapat mengakomodir jabatan kerja yang diperlukan oleh para asesi.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih kepada Balai Jasa Konstruksi Wilayah 4 Surabaya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada para mahasiswa yang akan lulus untuk mengikuti uji kompetensi agar siap menghadapi persaingan global setelah lulus dari perguruan tinggi.

Daftar Pustaka

- Fitria, A. (2017). Assessment Manajemen Risiko Pada Proyek Konstruksi High Rise Building (Studi kasus Proyek Tunjungan Plaza 6 Surabaya dan Proyek One East Residence Apartment). *Asce*.
- Gunawan, S., & Hakim, E. A. (2023). Pelaksanaan Konstruksi Bangunan Gedung. *Seminar Keinsinyuran Program Studi Program Profesi Insinyur*, 3(1). <https://doi.org/10.22219/skpsppi.v3i1.6561>
- Huliyah, N., Murtinugraha, R. E., & Widiyanti, I. (2023). Identifikasi Kompetensi yang Dibutuhkan sebagai Ahli Muda Perawatan Bangunan Gedung. *Jurnal Serambi Engineering*, 8(3). <https://doi.org/10.32672/jse.v8i3.6454>
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No 192 Tahun 2016, Pub. L. No. No 192 tahun 2016, Menteri Ketenaga Kerjaan Republik Indonesia (2016).
- Rahman, M. H., Romadhani, N. F., & Anas Arfandi. (2023). IDENTIFIKASI STANDAR

- KOMPETENSI AHLI TEKNIK BANGUNAN DI INDONESIA. *Menara: Jurnal Teknik Sipil*, 18(2). <https://doi.org/10.21009/jmenara.v18i2.35620>
- Ony Sulaksono. (2007). Pelatihan Ahli Struktur Baja Bangunan Gedung (Steel Structure Engineer of Buildings). *METODE PELAKSANAAN PEKERJAAN STRUKTUR Mempresentasikan*.
- Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, Pub. L. No. 2, Presiden Republik Indonesia (2017).
- Widiyanti, I., Lenggogeni, L., Sri Handoyo, S., Annisa Firdaus, D., & Human Maulana, S. (2021). Peningkatan Kompetensi Lulusan SMK Melalui Pelatihan Penjadwalan Pemeliharaan Bangunan Gedung. *Jurnal Syntax Admiration*, 2(9). <https://doi.org/10.46799/jsa.v2i9.314>
- Winarni, G., & Kuncorowati, P. W. (2020). PENERBITAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF) OLEH PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN. *AGORA*. <https://journal.student.uny.ac.id/index.php/civics/article/view/17287>